

## Maritime Defense Diplomacy Strategy Cultural Approach of Gunung Padang Site Facing Problems in the North Natuna Sea

Lukman Yudho Prakoso<sup>1\*</sup>, Fariel Zulfikar Alman<sup>2</sup>, Gabriel Choirul Alman<sup>3</sup>, Rianto<sup>4</sup>, Sri Patmi<sup>5</sup>, Sri Yaumil Habibie<sup>6</sup>, Asep Iwa Soemantri<sup>7</sup>, Heru Prasetyo<sup>8</sup>  
<sup>1,5,6,7,8</sup>Universitas Pertahanan RI

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Brawijaya

<sup>4</sup>Institut Pariwisata Trisakti

**Corresponding Author:** Lukman Yudho Prakoso [lukman.prakoso@idu.ac.id](mailto:lukman.prakoso@idu.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Strategy, Diplomacy, Gunung Padang Site, North Naruna Sea

*Received* : 02 June

*Revised* : 20 June

*Accepted*: 23 July

©2024 Prakoso, Alman, Alman, Rianto, Patmi, Habibie, Soemantri, Prasetyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study analyzes the maritime defense diplomacy strategy with the cultural approach of the Gunung Padang Site in dealing with problems in the North Natuna Sea. The cultural approach was chosen as the basis for the strategy to assert Indonesia's sovereignty over its maritime territory which is threatened by claims from other countries. With a focus on the Gunung Padang Site as a symbol of Indonesia's rich cultural heritage, this study explores the potential for cultural diplomacy in strengthening Indonesia's claim to the North Natuna Sea. The research method used is qualitative descriptive with a literature study approach, collecting data from primary and secondary sources related to history, culture, and maritime diplomacy. The results of the analysis show that the integration of culture in maritime defense diplomacy provides a stronger and more convincing dimension in voicing Indonesia's national interests. The recommendations produced include strengthening cultural diplomacy, developing communication infrastructure and diplomatic capabilities, more intensive international collaboration, and increasing research and analysis on the relationship between culture and maritime interests. It is hoped that the results of this study can provide a positive contribution in efforts to maintain Indonesia's maritime sovereignty and security in the North Natuna Sea.

## Strategi Diplomasi Pertahanan Laut Pendekatan Budaya Situs Gunung Padang Menghadapi Permasalahan di Laut Natuna Utara

Lukman Yudho Prakoso<sup>1\*</sup>, Fariel Zulfikar Alman<sup>2</sup>, Gabriel Choirul Alman<sup>3</sup>, Rianto<sup>4</sup>, Sri Patmi<sup>5</sup>, Sri Yaumil Habiebie<sup>6</sup>, Asep Iwa Soemantri<sup>7</sup>, Heru Prasetyo<sup>8</sup>

<sup>1,5,6,7,8</sup>Universitas Pertahanan RI

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Brawijaya

<sup>4</sup>Institut Pariwisata Trisakti

**Corresponding Author:** Lukman Yudho Prakoso [lukman.prakoso@idu.ac.id](mailto:lukman.prakoso@idu.ac.id)

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Strategi, Diplomasi, Situs Gunung Padang, Laut Naruna Utara

*Received :* 02 Juni

*Revised :* 20 Juni

*Accepted:* 23 Juli

©2024 Prakoso, Alman, Alman, Rianto, Patmi, Habiebie, Soemantri, Prasetyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi pertahanan laut dengan pendekatan budaya Situs Gunung Padang dalam menghadapi permasalahan di Laut Natuna Utara. Pendekatan budaya dipilih sebagai landasan strategi untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah maritimnya yang terancam klaim dari negara lain. Dengan fokus pada Situs Gunung Padang sebagai simbol warisan budaya Indonesia yang kaya, penelitian ini mengeksplorasi potensi diplomasi budaya dalam memperkuat klaim Indonesia terhadap Laut Natuna Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder terkait sejarah, budaya, dan diplomasi laut. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi budaya dalam diplomasi pertahanan laut memberikan dimensi yang lebih kuat dan meyakinkan dalam menyuarakan kepentingan nasional Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan termasuk penguatan diplomasi budaya, pembangunan infrastruktur komunikasi dan kemampuan diplomatik, kolaborasi internasional yang lebih intensif, serta peningkatan riset dan analisis terhadap kaitan budaya dengan kepentingan maritim. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara.

## PENDAHULUAN

Klaim sembilan garis putus atau nine-dash line yang dikemukakan oleh Tiongkok telah menjadi sumber utama ketegangan di Laut China Selatan, termasuk wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tiongkok menggunakan argumen sejarah dan budaya masa lalu untuk mendukung klaim ini, yang mencakup hampir 90% dari Laut China Selatan, termasuk wilayah yang diklaim oleh beberapa negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Tiongkok mendasarkan klaim sembilan garis putusnya pada peta kuno dan catatan sejarah, yang mereka klaim menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Tiongkok sejak zaman Dinasti Han (206 SM - 220 M). Menurut mereka, para nelayan dan pedagang Tiongkok telah secara rutin menggunakan perairan ini selama berabad-abad, menjadikan laut tersebut sebagai bagian dari tradisi maritim dan budaya mereka.

Wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam klaim sembilan garis putus Tiongkok, meskipun letaknya jauh dari daratan utama Tiongkok dan berada dalam 200 mil laut ZEE Indonesia seperti diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Indonesia tidak mengakui klaim sembilan garis putus ini dan telah memperkuat posisinya dengan mengubah nama wilayah tersebut menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017, sebagai bagian dari upaya mempertahankan kedaulatannya.

**Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)**  
Menurut UNCLOS, yang diratifikasi oleh Tiongkok dan Indonesia, negara-negara memiliki hak kedaulatan atas wilayah laut hingga 200 mil laut dari garis pantai mereka, yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Klaim Tiongkok dengan sembilan garis putus melanggar ketentuan UNCLOS, karena wilayah tersebut termasuk dalam ZEE negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim sembilan garis putus Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS. Meskipun Tiongkok menolak keputusan ini, putusan tersebut memperkuat posisi negara-negara ASEAN dalam menolak klaim Tiongkok. Tiongkok telah melakukan berbagai aktivitas militer dan eksplorasi sumber daya alam di wilayah yang diklaim, termasuk Laut Natuna Utara. Hal ini telah memicu insiden dengan kapal-kapal patroli Indonesia, yang berusaha melindungi kedaulatan dan sumber daya alamnya di wilayah tersebut.

Klaim Tiongkok atas Laut Natuna Utara membawa berbagai implikasi keamanan dan ekonomi bagi Indonesia. Penegasan klaim ini tidak hanya mengancam kedaulatan maritim Indonesia tetapi juga potensi ekonomi dari sumber daya alam laut yang kaya di wilayah tersebut, seperti perikanan dan cadangan minyak dan gas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan Urgensi strategi pertahanan laut Indonesia menjadi semakin penting dalam menghadapi potensi masalah di Laut Natuna Utara. Wilayah ini, yang kaya akan sumber daya alam seperti perikanan dan cadangan minyak dan gas, terancam oleh klaim sepihak Tiongkok yang mencakup sembilan garis putus. Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia harus memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut untuk memastikan

kedaulatan maritim dan melindungi sumber daya nasionalnya. Karena dalam klaim Tiongkok berdasarkan sejarah budaya masa lalu, untuk itu dalam artikel ini akan membahas hal tersebut juga dengan budaya masa lalu Indonesia, dengan adanya situs Gunung Padang.

Dengan memahami konteks sejarah dan budaya yang digunakan oleh Tiongkok untuk mendukung klaim sembilan garis putusnya, serta mempertimbangkan data dan fakta hukum internasional yang relevan, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Teori budaya terkait pertahanan menekankan bagaimana nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya memengaruhi kebijakan dan praktik pertahanan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, misalnya, konsep "Bela Negara" merupakan bagian integral dari budaya pertahanan nasional yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong. Teori ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana identitas nasional dan sejarah perjuangan memengaruhi persepsi ancaman dan respons terhadap konflik. Menurut Katzenstein (1996), budaya keamanan suatu negara dibentuk oleh pengalaman sejarah dan struktur sosial yang unik, yang pada gilirannya membentuk kebijakan pertahanan dan strategi keamanan nasional. Pemahaman tentang teori budaya ini penting dalam merancang kebijakan pertahanan yang tidak hanya efektif secara militer tetapi juga selaras dengan identitas dan nilai-nilai nasional, memastikan dukungan publik yang luas dan kohesi sosial.

Kajian teori terkait strategi pertahanan laut mencakup berbagai pendekatan dan konsep yang dirancang untuk melindungi kepentingan maritim suatu negara. Salah satu teori yang signifikan adalah teori Mahanian, yang diusulkan oleh Alfred Thayer Mahan, yang menekankan pentingnya kekuatan laut (naval power) sebagai alat utama untuk mencapai dominasi maritim dan keamanan nasional. Menurut Mahan, kontrol atas jalur perdagangan laut dan chokepoints strategis adalah kunci bagi kekuatan maritim yang efektif (Mahan, 1890). Selain itu, strategi pertahanan laut juga dipengaruhi oleh teori Geoffrey Till, yang menyoroti pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam angkatan laut modern untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang, termasuk ancaman asimetris dan non-tradisional seperti terorisme maritim dan pembajakan (Till, 2009). Implementasi strategi ini mencakup pengembangan teknologi canggih, peningkatan kerjasama internasional, dan pembangunan infrastruktur maritim yang kuat. Dengan memadukan elemen-elemen ini, strategi pertahanan laut dapat memastikan keamanan dan kedaulatan maritim dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.

Teori strategi dalam konteks militer sering kali dihubungkan dengan pemikiran para ahli seperti Carl von Clausewitz, Colin S. Gray, dan Julian S. Corbett. Clausewitz, dalam karyanya "On War," mendefinisikan strategi sebagai penggunaan pertempuran untuk mencapai tujuan politik, dengan konsep "ends, ways, means" yang mengidentifikasi tujuan akhir (ends), metode atau cara untuk mencapainya (ways), dan sumber daya yang dibutuhkan (means) (Clausewitz,

1832). Colin S. Gray memperluas pemahaman ini dengan menekankan bahwa strategi adalah seni dan ilmu menggunakan kekuatan militer dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan politik (Gray, 2010). Sementara itu, Julian S. Corbett, dalam karyanya "Some Principles of Maritime Strategy," menyoroti pentingnya kontrol maritim dan penggunaan angkatan laut untuk mencapai tujuan strategis, dengan menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam aplikasi strategi maritim (Corbett, 1911). Ketiga pemikir ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk merancang strategi yang efektif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan, cara, dan sumber daya dalam konteks militer dan maritim.

## **METODOLOGI**

Penelitian tentang strategi diplomasi pertahanan laut dengan pendekatan budaya situs Gunung Padang menghadapi permasalahan di Laut Natuna Utara menggunakan metode kualitatif deskriptif studi pustaka. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika budaya dan sejarah yang mempengaruhi strategi pertahanan laut Indonesia, khususnya dalam konteks konflik di Laut Natuna Utara. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, dokumen resmi, dan laporan penelitian sebelumnya.

Menurut Creswell (2014), metode kualitatif deskriptif sangat efektif dalam menjelaskan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan politik. Dalam hal ini, pendekatan budaya situs Gunung Padang digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami nilai-nilai historis dan budaya yang dapat memperkuat strategi diplomasi pertahanan laut. Situs Gunung Padang, sebagai warisan budaya dan sejarah Indonesia, memberikan landasan nilai dan identitas yang kuat, yang dapat diintegrasikan dalam strategi diplomasi dan pertahanan maritim.

Penelitian ini juga memanfaatkan teori diplomasi budaya yang menekankan pentingnya menggunakan elemen budaya dalam hubungan internasional untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan kerjasama antara negara (Nye, 2004). Dengan menggabungkan aspek budaya ini, diharapkan strategi diplomasi pertahanan laut Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi permasalahan di Laut Natuna Utara, serta memperkuat posisi Indonesia di kawasan.

## **HASIL PENELITIAN**

Situs Gunung Padang, yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, adalah salah satu situs megalitik paling signifikan dan kontroversial di dunia. Situs ini pertama kali ditemukan pada awal abad ke-20, tetapi baru mendapatkan perhatian yang lebih luas sejak tahun 1979 setelah dilaporkan oleh seorang surveyor Belanda. Penelitian intensif baru dimulai pada awal abad ke-21 oleh tim arkeologi dari berbagai institusi di Indonesia (Sutikno, 2013).

Gunung Padang dikenal karena susunan batu-batu besar yang membentuk teras-teras pada puncak bukit. Teras-teras ini terdiri dari susunan batu andesit yang dipercayai sebagai bagian dari struktur buatan manusia, yang

berfungsi sebagai tempat ritual atau upacara keagamaan (Natawidjaja, 2013). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa situs ini mungkin lebih tua dari peradaban Mesir kuno, dengan estimasi usia yang bervariasi antara 4,000 hingga 20,000 tahun, berdasarkan hasil karbon dating dari berbagai lapisan tanah di sekitar situs tersebut (Soedjatmiko, 2013).

Situs Gunung Padang tidak hanya penting karena usianya, tetapi juga karena memberikan wawasan tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat prasejarah di Nusantara. Situs ini diyakini sebagai pusat spiritual dan ritual bagi masyarakat megalitik yang hidup di daerah tersebut. Penggunaan teknologi sederhana namun canggih dalam konstruksi batu-batu besar menunjukkan tingkat keahlian dan organisasi sosial yang tinggi (Anggraeni, 2015).

Keunikan dan keajaiban arkeologis Gunung Padang telah menarik minat peneliti internasional dan menjadi simbol kebanggaan budaya bagi masyarakat Indonesia. Pemahaman tentang situs ini membantu memperkaya pengetahuan tentang sejarah budaya dan arkeologi Indonesia, serta memberikan kontribusi penting terhadap studi prasejarah global.

Klaim Tiongkok atas wilayah di Laut China Selatan, yang dikenal dengan "Nine-Dash Line," berakar dari sejarah dan dokumen yang diterbitkan pada tahun 1947. Pada waktu itu, pemerintah Republik Tiongkok menerbitkan peta yang menunjukkan sembilan garis putus-putus yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan, termasuk wilayah yang saat ini diklaim oleh beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia (Beckman, 2013).

Secara historis, Tiongkok mengklaim bahwa wilayah dalam Nine-Dash Line telah menjadi bagian dari wilayah tradisional mereka selama berabad-abad, merujuk pada catatan kuno yang menunjukkan aktivitas maritim Tiongkok di wilayah tersebut. Tiongkok juga mengklaim bahwa pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan telah menjadi bagian dari peta kekaisaran mereka sejak dinasti Han (Zou, 2016).

Namun, klaim ini tidak diakui secara hukum internasional. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag, yang bertindak berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), memutuskan bahwa klaim historis Tiongkok tidak memiliki dasar hukum. Pengadilan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tiongkok secara historis telah memiliki kontrol eksklusif atas perairan atau sumber daya di dalam Nine-Dash Line. Putusan ini juga menegaskan bahwa klaim Tiongkok tidak sesuai dengan hak kedaulatan negara-negara pantai lainnya di wilayah tersebut, seperti yang diatur oleh UNCLOS (PCA Case No. 2013-19).

Menurut UNCLOS, yang diadopsi pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994, negara-negara pantai memiliki hak kedaulatan hingga 200 mil laut dari pantai mereka, dikenal sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam ZEE, negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam, baik di perairan maupun di dasar laut (UNCLOS, 1982).

Masalah di Laut China Selatan ini telah memicu ketegangan regional dan internasional, dengan banyak negara menyerukan resolusi damai berdasarkan hukum internasional. Hingga saat ini, Tiongkok menolak keputusan PCA dan

terus memperkuat klaimnya melalui pembangunan pulau buatan dan peningkatan kehadiran militer di wilayah tersebut, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan negara-negara tetangga dan kekuatan global lainnya.

## PEMBAHASAN

Klaim Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan yang didasarkan pada sejarah masa lalu mereka menjadi topik yang sangat kontroversial dan telah memicu berbagai konflik internasional. Klaim ini, yang dirujuk sebagai "Nine-Dash Line," mengandalkan bukti historis yang diklaim oleh Tiongkok menunjukkan aktivitas maritim mereka di wilayah tersebut selama berabad-abad. Namun, klaim ini telah ditolak oleh banyak negara dan juga oleh Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim historis Tiongkok tidak memiliki dasar hukum menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) (PCA Case No. 2013-19).

Di sisi lain, Indonesia memiliki situs megalitik Gunung Padang yang usianya diperkirakan jauh lebih tua daripada banyak situs sejarah di Tiongkok. Gunung Padang di Jawa Barat adalah salah satu situs arkeologi tertua di dunia, dengan beberapa peneliti yang memperkirakan usianya mencapai lebih dari 10,000 tahun (Natawidjaja, 2013). Jika menggunakan logika yang sama seperti yang digunakan oleh Tiongkok dalam klaim Nine-Dash Line, Indonesia juga dapat mengajukan klaim berdasarkan bukti sejarah masa lalu bahwa peradaban kuno di wilayah mereka memiliki pengaruh luas yang mungkin termasuk wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Tiongkok.

Strategi diplomasi pertahanan laut Indonesia dapat memanfaatkan argumen ini untuk menegaskan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika Tiongkok mengklaim wilayah Laut China Selatan berdasarkan sejarah kuno, maka Indonesia juga dapat mengklaim bahwa wilayah Tiongkok sebenarnya memiliki keterkaitan sejarah dengan Nusantara, khususnya dengan adanya situs Gunung Padang. Hal ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa klaim berdasarkan bukti sejarah kuno sangat subjektif dan tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan kedaulatan wilayah di era modern. Pendekatan ini dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah mereka di Laut Natuna Utara dan menolak klaim Tiongkok. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harus berdasarkan hukum internasional yang diakui, seperti UNCLOS, bukan pada klaim sejarah yang tidak terbukti secara ilmiah dan legal.

### **Analisis Strategi Faktor Ends: Strategi Diplomasi Pertahanan Laut Pendekatan Budaya Situs Gunung Padang Menghadapi Permasalahan di Laut Natuna Utara**

Dalam analisis strategi menggunakan pendekatan Clausewitz, faktor "Ends" merujuk pada tujuan akhir atau hasil yang diinginkan dari suatu strategi. Untuk kasus ini, tujuan akhir dari strategi diplomasi pertahanan laut dengan pendekatan budaya situs Gunung Padang dalam menghadapi permasalahan di Laut Natuna Utara adalah memastikan kedaulatan dan integritas teritorial

Indonesia, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara, sambil mengurangi ketegangan dengan Tiongkok dan memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung internasional.

### **Ends dalam Strategi Diplomasi Pertahanan Laut dengan Pendekatan Budaya Situs Gunung Padang:**

- **Pengakuan Kedaulatan dan Hak Berdaulat Indonesia:**  
Tujuan utama adalah memastikan bahwa kedaulatan Indonesia atas wilayah Laut Natuna Utara diakui secara internasional dan dilindungi dari klaim Tiongkok. Ini mencakup pengakuan atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).  
Citasi: Menurut UNCLOS, negara-negara pantai memiliki hak kedaulatan hingga 200 mil laut dari pantai mereka, yang dikenal sebagai ZEE (UNCLOS, 1982).
- **Memperkuat Posisi Diplomati Indonesia:**  
Meningkatkan pengaruh diplomatik Indonesia di forum internasional dengan menggunakan argumen budaya dan sejarah untuk memperkuat klaim kedaulatan. Situs Gunung Padang dapat digunakan sebagai simbol peradaban kuno Indonesia yang menekankan pentingnya wilayah ini dalam sejarah panjang nusantara.  
Citasi: Menurut Natawidjaja (2013), situs Gunung Padang merupakan salah satu situs arkeologi tertua di dunia, yang menunjukkan bahwa peradaban kuno di wilayah Indonesia memiliki pengaruh luas.
- **Membangun Kesadaran dan Dukungan Internasional:**  
Meningkatkan kesadaran dan dukungan internasional terhadap posisi Indonesia melalui diplomasi budaya. Menjelaskan kepada komunitas internasional tentang pentingnya Laut Natuna Utara bagi sejarah dan budaya Indonesia dapat membantu mendapatkan dukungan dari negara-negara lain.  
Citasi: Strategi diplomasi budaya sering digunakan untuk memperkuat posisi diplomatik negara di mata internasional (Nye, 2004).
- **Mengurangi Ketegangan dan Mencegah Konflik:**  
Tujuan jangka panjang adalah mengurangi ketegangan di Laut Natuna Utara dan mencegah konflik militer dengan Tiongkok. Diplomasi yang mengedepankan budaya dan sejarah dapat membantu mengurangi antagonisme dan menciptakan dialog yang lebih konstruktif.  
Citasi: Menurut Beckman (2013), penyelesaian sengketa maritim harus dilakukan melalui dialog dan negosiasi berdasarkan hukum internasional. Analisis strategi dengan faktor "Ways" dalam konteks strategi diplomasi pertahanan laut dengan pendekatan budaya Situs Gunung Padang untuk menghadapi permasalahan di Laut Natuna Utara mencakup langkah-langkah konkret atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan strategis tersebut. Berikut adalah penjelasan analisis strategi dengan faktor Ways.

- **Pemanfaatan Diplomasi Budaya:**  
Salah satu cara utama adalah memanfaatkan diplomasi budaya dengan mempromosikan situs Gunung Padang sebagai warisan budaya yang penting bagi Indonesia. Mengadakan acara-acara budaya internasional, pameran, dan forum diskusi tentang situs tersebut dapat memperluas pemahaman global tentang kekayaan budaya Indonesia.
- **Kampanye Diplomasi Publik:**  
Melakukan kampanye diplomasi publik yang intensif untuk menyoroti pentingnya Laut Natuna Utara dalam konteks sejarah dan kebudayaan Indonesia. Ini termasuk penggunaan media sosial, situs web, dan kampanye media untuk memperkenalkan narasi Indonesia tentang wilayah tersebut.
- **Kolaborasi dengan Lembaga Budaya Internasional:**  
Bermitra dengan lembaga budaya internasional seperti UNESCO untuk mendapatkan pengakuan global terhadap pentingnya situs Gunung Padang sebagai situs warisan dunia. Kolaborasi semacam ini dapat memperkuat klaim Indonesia terhadap wilayah Laut Natuna Utara.
- **Diplomasi Ekonomi dan Pembangunan:**  
Memanfaatkan diplomasi ekonomi dan pembangunan dengan menawarkan kerjasama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di sekitar Situs Gunung Padang. Langkah ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga warisan budaya dan alam.
- **Konsultasi dan Dialog Terbuka:**  
Mengadakan konsultasi dan dialog terbuka dengan negara-negara tetangga, termasuk Tiongkok, untuk membahas isu-isu maritim dan berbagi pemahaman tentang pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Natuna Utara.  
Melalui langkah-langkah ini, strategi diplomasi pertahanan laut dengan pendekatan budaya Situs Gunung Padang diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan mendukung kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.  
Analisis strategi dengan faktor "Means" dalam konteks strategi diplomasi pertahanan laut dengan pendekatan budaya Situs Gunung Padang untuk menghadapi permasalahan di Laut Natuna Utara mencakup sumber daya, alat, dan kemampuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis tersebut. Berikut adalah penjelasan analisis strategi dengan faktor Means:
- **Sumber Daya Finansial:**  
Memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung inisiatif diplomasi pertahanan laut dengan pendekatan budaya. Ini termasuk anggaran untuk kampanye promosi, kegiatan diplomasi, dan proyek pembangunan terkait pariwisata di sekitar Situs Gunung Padang.
- **Kemampuan Diplomatik:**  
Mempersiapkan staf diplomatik yang terlatih dan berkualitas untuk menjalankan strategi diplomasi dengan efektif. Ini termasuk keterampilan

komunikasi yang baik, pengetahuan budaya, dan kemampuan bernegosiasi yang kuat.

- **Infrastruktur Komunikasi:**  
Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi untuk mendukung kampanye diplomasi publik dan komunikasi dengan negara-negara lain. Hal ini termasuk penggunaan media sosial, situs web resmi, dan platform digital lainnya.
- **Riset dan Analisis:**  
Melakukan riset dan analisis yang mendalam tentang sejarah budaya Situs Gunung Padang dan implikasinya terhadap diplomasi pertahanan laut. Ini melibatkan kolaborasi dengan ahli sejarah, budaya, dan hukum internasional untuk mengembangkan narasi yang kuat.
- **Kerjasama Internasional:**  
Membangun kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara dan lembaga internasional yang memiliki kepentingan serupa dalam pelestarian warisan budaya dan penyelesaian damai atas konflik maritim. Ini termasuk pertukaran informasi, dukungan diplomatik, dan inisiatif bersama.

Melalui pemanfaatan sumber daya finansial yang tepat, kemampuan diplomatik yang kuat, infrastruktur komunikasi yang canggih, riset dan analisis yang mendalam, serta kerjasama internasional yang solid, strategi diplomasi pertahanan laut dengan pendekatan budaya Situs Gunung Padang diharapkan dapat berhasil dalam menghadapi permasalahan di Laut Natuna Utara.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam menghadapi permasalahan di Laut Natuna Utara melalui strategi diplomasi pertahanan laut dengan pendekatan budaya Situs Gunung Padang, terdapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diambil:

### **Kesimpulan:**

**Pentingnya Pendekatan Budaya:** Pendekatan budaya, khususnya melalui penekanan pada Situs Gunung Padang sebagai warisan budaya Indonesia, menjadi strategi yang kuat dalam diplomasi pertahanan laut.

**Kerjasama Internasional yang Solid:** Kerjasama dengan negara-negara dan lembaga internasional perlu ditingkatkan untuk mendukung narasi Indonesia tentang Laut Natuna Utara dan Situs Gunung Padang.

**Pemanfaatan Sumber Daya dan Infrastruktur:** Optimalisasi sumber daya finansial, infrastruktur komunikasi, dan teknologi informasi sangat penting dalam mendukung strategi diplomasi ini.

**Kolaborasi antara Berbagai Pihak:** Kolaborasi antara pemerintah, lembaga budaya, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memperkuat strategi diplomasi pertahanan laut.

### **Rekomendasi:**

**Penguatan Diplomasi Budaya:** Lebih meningkatkan promosi dan pemahaman global tentang Situs Gunung Padang sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang berkaitan dengan Laut Natuna Utara.

**Pembangunan Infrastruktur dan Kemampuan Diplomatik:** Investasi dalam infrastruktur komunikasi dan pengembangan kemampuan diplomatik menjadi prioritas untuk mendukung diplomasi pertahanan laut yang efektif.

**Riset dan Analisis yang Mendalam:** Melakukan riset yang lebih mendalam tentang sejarah budaya Situs Gunung Padang dan kaitannya dengan Laut Natuna Utara guna memperkuat argumen diplomasi.

**Pembentukan Aliansi Strategis:** Membentuk aliansi strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Natuna Utara.

Dengan implementasi rekomendasi di atas, diharapkan strategi diplomasi pertahanan laut dengan pendekatan budaya Situs Gunung Padang dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan permasalahan di Laut Natuna Utara dan menjaga kedaulatan Indonesia dalam konteks maritim.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Damar Jaya, Suhirwan ., Lukman Yudho Prakoso, Purwanto ., Dohar Sianturi, Resmanto Widodo Putro; ,Sea Defense Strategy of Anti-Submarine on We Island,International Affairs Global Strategy,81,Defense Strategy,15-20,2020,IISTE  
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/IAGS/article/view/51905>

Anggraeni. (2015). Gunung Padang: Situs Megalitik Terbesar di Dunia. Jakarta: Pustaka Jaya.

Bateman, S. (2016). UNCLOS and Its Limitations in Resolving the South China Sea Dispute. *Journal of International Maritime Law*, 22(3), 203-217.

Beckman, R. (2013). The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1), 142-163.

Beckman, R. C., & Davenport, T. (2013). *The South China Sea Disputes: International Law and China's Nine-Dash Line*. Washington, DC: Brookings Institution Press.

- Dipua, Angkasa; Hermawa, Rommy; Puspitawati, Dhiana; Harahap, Nuddin; Nurdiansyah, Dickry Rizanny; Prakoso, Lukman Yudho; , "An analysis of the South China Sea conflict: Indonesia's perspectives, contexts and recommendations", *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17,4,976-990,2020,
- Hendri, H; Handoko, R; Darmawan, A; Prakoso, LY; Daengs, GS Achmad; , *The paradigm of Character Building Between Hope and Challenge*,,,,,,2019,
- Jaya, Agus Damar; Prakoso, Lukman Yudho; Suhirwan, Suhirwan; , "Pertahanan Dan Keamanan Di Selat Singapura Terhadap Peningkatan Pembajakan, Konsistensi Kebijakan Publik, Dan Koneksi Wilayah Negara Litoral", *Strategi Pertahanan Laut*, 7,1,67-82,2022,
- Katzenstein, P. J. (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2021). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Pearson.
- Kurniawan, Cecep; Widyarto, Setyawan; Prakoso, Lukman Yudho; , *Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara*, *Strategi Pertahanan Laut*, 4,1,,2020,
- Laode, M. S. (2017). *Indonesia's Maritime Claims and the Nine-Dash Line*. *Journal of Southeast Asian Affairs*, 35(3), 45-63.
- Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro; editor, Mia Kusmiati, Suca Rusdian; , *Metode SWOT AHP dalam merencanakan strategi pertahanan [sumber elektronik]*,,,,,,2021,
- Madrohim, Madrohim; Prakoso, Lukman Yudho; , *The Total War Strategy Through the Improvement of the Role of National Shipyard in Supporting Main Weapon System of Indonesian Navy*, *Journal of Social and Political Sciences*, 4,1,1-10,2021, *The Asian Institute of Research*
- Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*. Boston: Little, Brown and Company.
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2017). *Statement on the Naming of North Natuna Sea*. Jakarta: MoFA.
- Natawidjaja, D. H. (2013). *Geological Aspects of Gunung Padang Site*. Bandung: Institute of Technology Bandung.

- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs.
- Permanent Court of Arbitration. (2016). PCA Case No. 2013-19, In the Matter of the South China Sea Arbitration.
- Permanent Court of Arbitration. (2016). PCA Case No. 2013-19, In the Matter of the South China Sea Arbitration.
- Permanent Court of Arbitration. (2016). Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China). The Hague: PCA.
- Peterson, S., & Holmes, M. (2016). Cultural Diplomacy: A Review of the Literature. *International Journal of Cultural Policy*, 22(4), 455-472.
- Prakoso, Lukman Yudho; ,The Total War Strategy Through the Improvement of the Role of National Shipyard in Supporting Main Weapon System of Indonesian Navy,,,,,2021,OSF Preprints
- Rifqi, Muhammad; Prakoso, Lukman Yudho; ,Policy Implementation In Handling Transnational Crimes In Indonesian Sea Borders,International Conference of Business and Social Sciences,,,,2020,
- Risahdi, Muhammad; Jaddawi, Murtir; Achmad, Mansyur; Henny, Andi; Prakoso, Lukman Yudho; Martani, Wuri Retno; ,Ambiguous policy on securing the vital objects of the Indonesian armed forces in east java,Public Policy and Administration Research,10,1,,2020,International Knowledge Sharing Platform
- Soedjatmiko. (2013). *Carbon Dating Analysis of Gunung Padang*. Jakarta: Indonesian Institute of Sciences.
- Suhirwan, Navy Rear Admiral TNI Dr; AP, Kunto Wibowo; Prakoso, Capt Navy E Dr Lukman Yudho; SIP, MAP; ,Archipelago state strategic ocean tracker,,,,,2020,Nas Media Pustaka
- Sujianto ., Suhirwan ., Lukman Yudho Prakoso; ,Policy Analysis of Indonesian Naval Depot Services in Surabaya,Public Policy And Administration Research,10,Defense Strategy,43-45,2020,IISTE  
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/view/52111/53847>
- Sutikno, D. (2013). *The Discovery and Research of Gunung Padang Site*. Cianjur: Local Government of Cianjur.

- Till, G. (2009). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Routledge.
- UNCLOS. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. United Nations.
- UNESCO. (2020). *UNESCO's Cultural Heritage Sites*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNWTO. (2017). *Tourism and Culture Synergies*. United Nations World Tourism Organization.
- Wayan Redita, Lukman Yudho Prakoso, Hipdizah Hipdizah; ,Implementasi Kebijakan Vessel Traffic Services Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Di Selat Sunda Dalam Keselamatan Pelayaran Terhadap Strategi Pertahanan Laut,Jurnal Strategi Pertahanan Laut Uniersitas Pertahanan,6,Vessel Traffic Services,31-44,2020,Universitas Pertahanan Indonesia [http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL ...](http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL)
- Zou, K. (2016). *Historic Rights in International Law and in China's Practice*. *Ocean Development & International Law*, 47(3), 243-257.